



Analisis Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

Dylan Baptista Varani Tatu^{1*}, Apriana H. J. Fanggidae², Siprianus G. Tefa³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Indonesia
apriana.fanggidae@staf.undana.ac.id^{2*}, siprianus.tefa@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: dylantatu31@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the factors affecting regional financial management at the Department of Population and Civil Registration of Manggarai Regency during the 2019-2023 period. The research method used is a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative analysis. Data were obtained through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that regional financial management is influenced by economic, effectiveness, and efficiency factors. This research is expected to provide recommendations to improve the financial management performance in the relevant agency.*

Keywords: *Regional Financial Management, Governmen, Manggarai Regency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai selama periode 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (*mixed method*) yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di instansi terkait.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Kabupaten Manggarai

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran (Nasution, 2018).

Tahun 2019 sampai dengan 2023 pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai masih mengalami ketidakstabilan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang sudah ditetapkan dengan adanya selisih yang berbeda pada setiap tahun. Anggaran pendapatan yang ada digunakan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan dijadikan kas daerah sedangkan anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional dinas adalah anggaran belanja. Anggaran belanja sendiri didapatkan dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Terdapat pula anggaran pendapatan dengan nominal 0 karena

dari tahun 2021 sudah tidak ada denda dari keterlambatan pengurusan dokumen sehingga tidak adanya anggaran pendapatan pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Berdasarkan opini BPK terbaru yaitu tahun 2022 Kabupaten Manggarai sendiri mendapat opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian secara umum DISPENDUKCAPIL Kabupaten Manggarai telah menjalankan fungsi pengelolaan keuangan, tetapi belum diketahui faktor-faktor pengelolaan keuangan daerah pada DISPENDUKCAPIL sesuai dengan teori yang ada. Peneliti bermaksud mengetahui pengelolaan keuangan daerah pada DISPENDUKCAPIL Kabupaten Manggarai. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai belum menerapkan perhitungan atas faktor-faktor tersebut dalam pengelolaan keuangannya. Ketiadaan analisis terhadap aspek ekonomis, yang mencakup bagaimana sumber daya digunakan dengan biaya minimal, efektivitas yang melihat pencapaian tujuan dengan hasil yang optimal, serta efisiensi yang mengukur rasio *input* dan *output*, menimbulkan potensi masalah dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian terdahulu tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan menyatakan bahwa pada penelitian (Sitompul, 2018) penghitungan efektifitas anggaran Kecamatan Ledo adalah kecamatan dengan efektifitas penerimaan paling tinggi mencapai sementara efektifitas paling rendah adalah kecamatan Teriak. Bervariasinya nilai efektifitas penerimaan pendapatan setiap kecamatan berarti tingkat pengelolaan dan potensi keuangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang berbeda satu sama lainnya, baik itu potensi sumber daya alam, namun jika dilihat angka efektifitas semuanya di atas 90% jadi dikategorikan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran adalah indikator kunci dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan di setiap daerah, yang menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan untuk mencapai target pembangunan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor pengelolaan keuangan daerah yang memengaruhi ekonomis, efektivitas dan efisiensi anggaran di tingkat kabupaten Manggarai.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan tindakan atas nama mereka, terutama dalam kapasitas sebagai pengambil Keputusan (Surifah & Rofiqoh,

2020:44). Teori ini menyoroti masalah yang mungkin timbul dari perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agent*. Teori agensi dapat membantu menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemerintah daerah sebagai *agent* dan warga masyarakat sebagai *principals*.

Teori Perilaku (*Behaviour*)

Perilaku merupakan tindakan yang tampak atau pernyataan lisan mengenai perilaku. Dalam (Nugroho, 2021:11) istilah perilaku menunjukkan proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang terlibat dalam menilai, mencari, memakai suatu barang dan jasa. Intensi merupakan variabel yang menyebabkan terjadinya perilaku suatu sikap maupun variabel lain. Dalam konteks pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemahaman tentang perilaku, intensi, dan *Theory of Planned Behavior (TPB)* sangat relevan. Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan melibatkan berbagai tindakan yang terlihat, seperti penyusunan anggaran, pencairan dana, dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, intensi menjadi faktor kunci yang memengaruhi perilaku pegawai dan pengelola dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan.

Pengelolaan Keuangan

Menurut Horne (Kasmir, 2010:5), manajemen keuangan didefinisikan sebagai semua kegiatan yang terkait dengan perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan yang luas.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan atas keuangan daerah (Ratmono & Sholihin, 2017).

Proses pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yang terdapat dalam suatu instansi harus dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik mencakup 4 karakteristik pengelolaan keuangan yaitu, 1) Efektif, 2) Efisien, 3) Transparansi dan 4) Akuntabilitas (Halim, 2013:29).

Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi- fungsi manajemen bisa dipecah ke dalam beberapa hal:

1. Perencanaan (*Planning*). Fungsi ini adalah fungsi dasar dalam manajemen secara keseluruhan. Dalam setiap organisasi, diperlukan kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rohman, 2017:23).
2. Pengorganisasian (*organizing*). Fungsi ini adalah proses menetapkan struktur peran yang diperlukan untuk mengintegrasikan individu ke dalam sebuah organisasi (Hanafi, 2013:24).
3. Pelaksanaan. Fungsi *actuating* (pelaksanaan) menurut Sukwiaty (Rohman, 2017:29) dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan.
4. Pengendalian. Menurut Hadi (Rohman, 2017:31), *controlling* (pengawasan) juga dikenal sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sifat Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga disusun untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2010:86). Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan adalah (Kasmir, 2010:88):

- a) Bersifat historis. Bersifat historis berarti laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data masa lalu atau waktu yang sudah berlalu.
- b) Bersifat menyeluruh berarti laporan keuangan dibuat sekomprensif mungkin, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ekonomis

Konsep ekonomis sangat erat hubungannya dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Esensi dari ekonomis adalah memastikan sumber daya *input* diperoleh dengan harga serendah mungkin, yaitu harga yang mendekati harga pasar (Mahmudi, 2010:83).

Efektivitas

Efektivitas mengukur hubungan antara *output* dan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, semakin efektiflah organisasi, program, atau kegiatan

tersebut. Sementara ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, atau disebut juga *spending wisely* (Mahmudi, 2010:86).

Efisiensi

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien jika dapat menghasilkan *output* tertentu dengan *input* seminimal mungkin, atau dengan *input* tertentu dapat menghasilkan *output* sebanyak mungkin (*spending well*). Konsep efisiensi bersifat relatif, bukan absolut. Misalnya, Unit A dikatakan lebih efisien dibandingkan Unit B jika Unit A menggunakan lebih sedikit sumber daya *input* dibandingkan Unit B untuk menghasilkan *output* yang sama, atau dengan jumlah *input* yang sama, Unit A bisa menghasilkan *output* lebih banyak dibandingkan Unit B (Mahmudi, 2010:85).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, (*Mixed method* dengan jenis Penelitian pada penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemahaman dan gambaran mengenai faktor-faktor pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai tahun 2019-2023, serta data kuantitatif berupa laporan keuangan Dinas, yang berisi angka-angka tentang rincian pengelolaan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer (hasil wawancara) dan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui kajian literatur, artikel, jurnal, dan pencatatan yang tercantum dalam dokumen dan laporan. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman yang terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

a. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai menunjukkan efektivitas dalam menjalankan fungsi perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan anggaran yang diterapkan mencakup tahapan-tahapan kritis, di antaranya adalah identifikasi aspek-aspek penting dalam penyusunan anggaran serta penentuan prioritas yang strategis untuk alokasi dan penggunaan anggaran. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara efisien, tetapi juga mencerminkan pertimbangan yang mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan demikian, Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dapat dianggap berhasil dalam merumuskan dan mengimplementasikan perencanaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang baik.

b. Pengorganisasian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan terstruktur. Struktur organisasi di Dispendukcapil mencakup staf-staf yang ditempatkan pada sub bagian keuangan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi antar bagian yang baik memungkinkan integrasi dan sinergi dalam proses pengelolaan keuangan, yang berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang efektif antar sub bagian, Dispendukcapil dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara optimal.

c. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan fungsi pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan, meskipun di lapangan mereka menghadapi berbagai halangan dan masalah. Dalam konteks ini, Dispendukcapil berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif, yang mencerminkan kapasitas adaptasi dan *problem-solving* yang tinggi. Selain itu, lembaga ini secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran. Proses evaluasi dan pemantauan ini

tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas.

d. Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan. Lembaga ini secara sistematis menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan dana, yang mencakup pengembangan prosedur dan kebijakan internal yang ketat. Proses pengendalian ini juga mencakup pelaksanaan audit secara rutin terhadap penggunaan anggaran, baik oleh auditor internal maupun eksternal, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan identifikasi potensi penyimpangan. Selain itu, Dispendukcapil secara proaktif merespons temuan audit dengan segera, melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, Dispendukcapil Kabupaten Manggarai memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

2. Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Faktor ekonomis berfokus pada minimalisasi biaya sambil memenuhi kebutuhan, efektivitas menilai sejauh mana tujuan dan hasil yang diinginkan tercapai, dan efisiensi mengukur hubungan antara *input* dan *output* untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Integrasi ketiga faktor ini esensial untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBD Dispendukcapil Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	800.000.000	762.725.000	(95,34%)	5.850.796.572	5.723.807.687	(97,83%)
2020	800.000.000	549.775.000	(68,72%)	4.387.445.819	4.205.300.357	(95,85%)
2021	247.152.000	271.475.000	(109,84%)	5.401.351.809	4.965.317.958	(91,93%)
2022	-	-		5.112.391.302	4.960.247.820	(97,02%)
2023	-	-		3.103.991.586	2.989.355.989	(96,31%)

Sumber: DISPENUKCAPIL, Kab. Manggarai, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan faktor-faktor pengelolaan keuangan daerah pada Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Rasio Ekonomis

Tabel 2. Perhitungan Rasio Ekonomis

Faktor	Tahun	Perhitungan	Persentase	Keterangan
Tingkat Ekonomis	2019	$\frac{5.723.807.687}{5.850.796.572} \times 100\%$	97,83%	Ekonomis
	2020	$\frac{4.205.300.357}{4.387.445.819} \times 100\%$	95,85%	Ekonomis
	2021	$\frac{4.965.317.958}{5.401.351.809} \times 100\%$	91,93%	Ekonomis
	2022	$\frac{4.960.247.820}{5.112.391.302} \times 100\%$	97,02%	Ekonomis
	2023	$\frac{2.989.355.989}{3.103.991.586} \times 100\%$	96,31%	Ekonomis
Kriteria Ekonomis: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) artinya ekonomis Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) artinya ekonomi berimbang Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) artinya tidak ekonomis				

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan analisis tingkat ekonomis hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Dispendukcapil Kabupaten Manggarai untuk periode tahun 2019-2023 mencatat persentase yang kurang dari 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada periode tersebut ekonomis.

b. Rasio Efektivitas

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas

Faktor	Tahun	Perhitungan	Persentase	Keterangan
Tingkat Efektivitas	2019	$\frac{762.725.000}{800.000.000} \times 100\%$	95,34%	Efektif
	2020	$\frac{549.775.000}{800.000.000} \times 100\%$	68,72%	Kurang Efektif
	2021	$\frac{271.475.000}{247.152.000} \times 100\%$	109,84%	Sangat Efektif
	2022	$\frac{-}{-} \times 100\%$	-	-
	2023	$\frac{-}{-} \times 100\%$	-	-
Kriteria Efektivitas: Jika diperoleh nilai lebih besar dari 100% artinya sangat efektif Jika diperoleh nilai 90% - 100% artinya efektif Jika diperoleh nilai 80% - 90% artinya cukup efektif Jika diperoleh nilai 60% - 80% artinya kurang efektif Jika diperoleh nilai kurang dari 60% artinya tidak efektif				

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah dikategorikan sebagai efektif, pada tahun 2020 dinyatakan kurang efektif, dan pada tahun 2021 dinyatakan sangat efektif.

c. Rasio Efisiensi

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi

Faktor	Tahun	Perhitungan	Persentase	Keterangan	
Tingkat Efisiensi	2019	$\frac{0}{6.486.532.687} \times 100\%$	0,00%	Sangat Efisien	
		$\frac{0}{4.755.075.357} \times 100\%$	0,00%	Sangat Efisien	
	2020	$\frac{0}{5.236.792.958} \times 100\%$	0,00%	Sangat Efisien	
		$\frac{0}{4.960.247.820} \times 100\%$	0,00%	Sangat Efisien	
	2021	$\frac{0}{2.989.355.989} \times 100\%$	0,00%	Sangat Efisien	
	2022				
	2023				
Kriteria Efisiensi:					
Jika diperoleh nilai lebih besar dari 100% artinya tidak efisien					
Jika diperoleh nilai 90% - 100% artinya kurang efisien					
Jika diperoleh nilai 80% - 90% artinya cukup efisien					
Jika diperoleh nilai 60% - 80% artinya efisien					
Jika diperoleh nilai kurang dari 60% artinya sangat efisien					

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan yang tertera, analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai untuk periode tahun 2019-2023 dinyatakan sangat efisien. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai menunjukkan implementasi yang terstruktur melalui sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan. Dalam perencanaan, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran, mencerminkan fungsi perencanaan yang matang dan terarah. Pengorganisasian dikelola dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan jabatan, disertai koordinasi yang efektif antara sub-bagian keuangan dan bidang-bidang lainnya, sehingga mendukung kualitas pengelolaan keuangan. Pada tahap

pelaksanaan, pengajuan anggaran dilakukan melalui prosedur yang terstruktur, sementara tantangan yang muncul diatasi melalui evaluasi dan pemantauan berkala. Pengendalian keuangan diterapkan melalui langkah pencegahan penyalahgunaan dana, audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta tindak lanjut yang konstruktif atas rekomendasi hasil audit, sehingga memperkuat transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

Relevansi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai dengan teori agensi terlihat dalam penerapan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan. Teori agensi menyoroti pentingnya mengatasi asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah daerah) dan agen (Dispendukcapil) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dalam perencanaan, analisis mendalam dan prioritas anggaran memastikan alokasi sumber daya sesuai kepentingan prinsipal. Pengorganisasian diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi asimetri informasi. Pada pelaksanaan, prosedur yang terstruktur dan evaluasi berkala memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana dan kepentingan publik. Pengendalian dilakukan melalui langkah pencegahan penyalahgunaan dana, audit kepatuhan, dan respons terhadap temuan audit, yang memperkuat transparansi dan integritas pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Dispendukcapil Kabupaten Manggarai mencerminkan penerapan prinsip-prinsip teori agensi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berlangsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kepentingan pemangku kepentingan, sekaligus mengurangi risiko yang timbul dari asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup empat karakteristik utama: efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam aspek efektivitas, perencanaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan yang terencana, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan *value for money*. Efisiensi tercermin dalam pelaksanaan anggaran yang terstruktur dan pemantauan berkala, sejalan dengan penerapan sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas, audit rutin, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, yang mendukung pengawasan dan memperkuat integritas pengelolaan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) Pelaksanaan fungsi perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang dan menengah serta perencanaan jangka pendek yang disusun oleh kepala dinas beserta pegawai, pelaksanaan fungsi pengorganisasian melalui adanya struktur organisasi dan tugas pokok pegawai, pelaksanaan fungsi pengarahan melalui program arahan kerja dan motivasi setiap apel pagi. Bentuk fungsi pengawasan berupa presensi pegawai serta monitoring dan evaluasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, kurangnya koordinasi antar pegawai, fasilitas penunjang pekerjaan kantor yang terbatas, pegawai kurang memahami tugas dan prosedur kerja, kurangnya motivasi kerja pegawai. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan yaitu, meningkatkan koordinasi antar pegawai melalui kegiatan informal, menambah fasilitas penunjang pekerjaan kantor, mensosialisasikan tugas pokok tertulis kepada pegawai, memberikan pengarahan yang jelas kepada pegawai.

Secara keseluruhan, praktik pengelolaan keuangan di Dispendukcapil Kabupaten Manggarai menunjukkan penerapan yang baik dari teori manajemen keuangan dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur yang ada tetapi juga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Faktor-faktor pengelolaan keuangan Dispendukcapil Kabupaten Manggarai terdiri dari:

a. Analisis Ekonomis

Secara keseluruhan, perhitungan tingkat ekonomis pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai untuk periode 2019-2023 yang dinyatakan sebagai ekonomis dapat dianalisis melalui teori ekonomis yang berkaitan dengan transformasi *input* primer menjadi *input* sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa Dispendukcapil telah berhasil memanfaatkan anggaran secara optimal, mengurangi pemborosan, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sesuai dengan esensi dari teori ekonomis yang menekankan pada pengelolaan biaya yang optimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lona dkk., 2023), hasil penelitian menunjukkan fluktuasi alokasi anggaran pendapatan dan belanja di Satuan Kerja

Politeknik Pertanian Negeri Kupang dari 2017 hingga 2021. Penggunaan anggaran masuk dalam kategori “ekonomis” dengan persentase realisasi di bawah 100%.

b. Analisis Efektivitas

Dalam konteks teori efektivitas, yang berfokus pada *outcome* atau hasil, pengelolaan keuangan dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dispendukcapil dapat dianggap sebagai organisasi yang efektif jika *output* yang dihasilkan dari anggaran pendapatan yang ada dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu pendapatan asli daerah, penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik. Oleh karena itu, meskipun terdapat fluktuasi dalam efektivitas selama periode yang dianalisis, pencapaian efektivitas yang tinggi pada tahun 2019 dan 2021 mencerminkan keberhasilan Dispendukcapil dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lona dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa Efektivitas realisasi pendapatan (PNBP) sangat efektif, melebihi 100% dari target, sementara efektivitas realisasi belanja tergolong cukup efektif, mencapai 91,30%. Namun, pada 2020, efektivitas realisasi anggaran terendah, hanya 86,76%, akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghambat program kegiatan. Penelitian dari (Ayu & Fatimah, 2022) juga mendukung hasil dari penelitian ini dengan menyatakan bahwa pengelolaan anggaran belanja oleh BPKAD Kota Magelang dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan variasi dalam efektivitas. Meskipun mengalami fluktuasi, tahun 2015 kurang efektif sementara tahun-tahun berikutnya (2016-2018) cukup efektif. Namun, realisasi anggaran masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

c. Analisis Efisiensi

Dalam kajian efisiensi, yang merujuk pada hubungan antara *output* berupa barang atau layanan yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi *output* tersebut, teori efisiensi berfokus pada rasio *output* terhadap *input*. Secara matematis, efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara *output* dan *input*, atau *output* per unit *input*. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Dispendukcapil Kabupaten Manggarai untuk periode 2019-2023, efisiensi pengelolaan dapat dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Dengan kata lain, Dispendukcapil Kabupaten Manggarai mampu mengelola keuangan daerah secara optimal tanpa menambah beban biaya tambahan untuk proses pengadaan APBD. Dalam hal ini, rasio *output* terhadap *input* menjadi sangat tinggi, mengindikasikan tingkat efisiensi yang luar biasa karena organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sangat efektif tanpa tambahan biaya, yang mencerminkan pencapaian efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap dkk., 2021) kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi dikategorikan sangat efisien karena semua hasil menunjukkan nilai di bawah 60%, dengan nilai tahun 2016 (10,35%), 2017 (8,55%), 2018 (7,35%), dan 2019 (9,61%). Penelitian yang juga mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Lona dkk., 2023) analisis efisiensi biaya menunjukkan kategori “sangat efisien”, dengan nilai rasio kurang dari 10% untuk setiap tahun anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah yang mencakup empat karakteristik utama: efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam aspek efektivitas, perencanaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran, menunjukkan adanya akuntabilitas dan *value for money*. Efisiensi terlihat dari pelaksanaan anggaran yang terstruktur serta pemantauan berkala yang mendukung sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Transparansi tercermin melalui keterbukaan pengelolaan anggaran, memungkinkan masyarakat mengakses informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, audit rutin, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, yang memperkuat integritas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Dispendukcapil tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi studi serupa, dengan catatan perlu dilakukan perbandingan dan penyesuaian terhadap konteks yang berbeda. Kedua, bagi objek penelitian, disarankan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran, meningkatkan

pengawasan, serta melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor pengelolaan keuangan daerah dengan metode yang berbeda, seperti dengan mengintegrasikan konsep *good governance*. Selain itu, perluasan penelitian ke sektor swasta juga dapat menjadi kajian menarik.

DAFTAR REFERENSI

- Ayu, S., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *ECODUCATION Economics & Education Journal*, 4(1). <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation>
- Hanafi, M. H. (2013). Manajemen keuangan. BPFE-Yogyakarta.
- Harahap, A. W., Mas'ut, Ilmiha, J., & Effendi, S. (2021). Analisis growth ratio, rasio efektivitas dan efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*.
- Kasmir. (2010). Pengantar manajemen keuangan. Kharisma Putra Utama.
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIK YKPN.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*.
- Nugroho, A. P. (2021). Theory of planned behaviour. CV. Brimedia Global.
- Rahmawati, I. F. (2018). Analisis pelaksanaan fungsi manajemen di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. *Sebelas Maret University*.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). Akuntansi keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Rohman. (2017). Dasar-dasar manajemen. Inteligencia Media.
- Sitompul, T. R. (2018). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Surifah, & Rofiqoh, I. (2020). Corporate governance badan usaha milik negara. Graha Aksara Makasar.